

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Akhmadi et al., (2022) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari penerimaan daerah yang bersumber dari kewenangan fiskal lokal, mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset milik pemerintah daerah, serta berbagai penerimaan lain yang diakui secara sah menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PAD meliputi penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai pendapatan sah lainnya. Melalui struktur penerimaan tersebut, pemerintah daerah diberikan ruang keleluasaan untuk menggali sumber pendapatan secara mandiri agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

###### **2.1.1.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Secara umum, penerimaan pemerintah berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan pengeluaran negara. Dalam struktur fiskal, penerimaan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak meliputi, antara lain, pendapatan

yang bersumber dari aktivitas pinjaman pemerintah, baik yang berasal dari lembaga domestik maupun dari sumber pinjaman luar negeri.

Dalam konteks pemerintahan daerah, klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mencakup empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Klasifikasi ini menegaskan bahwa PAD merupakan instrumen penting bagi daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

#### **2.1.1.2.1. Pajak Daerah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dipungut dari masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang. Dana yang dihimpun melalui mekanisme pemungutan tersebut dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik. Pada akhirnya, pemenuhan kepentingan umum tersebut juga mencakup kepentingan individu sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan (Sulistiano & Tanudjaja 2024). Adapun pajak daerah menurut Rumapea et al., (2023) Pajak daerah dapat dipahami sebagai kontribusi wajib yang dipenuhi oleh individu maupun badan kepada pemerintah daerah tanpa memperoleh balasan secara langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pembagian pajak Daerah menurut pasal 2 Undang-undang No 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan, baik kendaraan darat maupun kendaraan air, sebagai bentuk kontribusi wajib masyarakat kepada pemerintah daerah.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

Merupakan pajak atas proses peralihan kepemilikan kendaraan, yang umumnya terjadi ketika terjadi transaksi jual beli atau hibah, sehingga membantu pemerintah memastikan legalitas dan ketertiban administrasi kendaraan

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak ini merupakan pajak yang diberlakukan atas konsumsi bahan bakar oleh kendaraan, sebagai bentuk pengendalian

penggunaan energi dan upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui aktivitas transportasi.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas kegiatan pengambilan, pemanfaatan, atau pemakaian air yang berasal dari sumber air bawah tanah maupun air permukaan oleh individu maupun badan usaha. Pajak ini pada dasarnya diterapkan sebagai instrumen fiskal untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan sumber daya air agar tetap berkelanjutan.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas konsumsi rokok oleh masyarakat dan dipungut bersamaan dengan cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten dan Kota

a. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, warung, atau usaha sejenis yang menjual makanan dan minuman untuk dikonsumsi pelanggan.

b. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penginapan, fasilitas, dan jasa penunjang lainnya yang dinikmati oleh tamu.

c. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, yaitu segala bentuk pesan atau informasi komersial yang disampaikan kepada publik melalui media seperti billboard, baliho, spanduk, neon box, poster, hingga reklame digital. Pajak ini dipungut sebagai bentuk kontribusi wajib kepada pemerintah daerah atas pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan promosi.

d. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pungutan yang dikenakan pemerintah daerah atas setiap kegiatan yang menyajikan tontonan, pertunjukan, atau fasilitas rekreasi kepada masyarakat. Pajak ini berlaku pada berbagai jenis aktivitas, seperti konser musik, bioskop, pertunjukan seni, karaoke, diskotik, permainan ketangkasan, hingga wahana rekreasi.

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pungutan daerah yang dikenakan atas kegiatan pengambilan atau pemanfaatan mineral yang bukan termasuk kategori logam, seperti pasir, kerikil, batu kapur, tanah liat, dan bahan galian

sejenis. Pajak ini diberlakukan untuk memberikan kontribusi bagi daerah atas pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya.

f. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan listrik, baik yang disediakan oleh PLN maupun sumber lain yang hasilnya dipakai pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan.

g. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada pihak yang mengambil atau memanfaatkan air yang berasal dari bawah permukaan tanah.

h. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pungutan yang dikenakan pemerintah daerah atas penyelenggaraan layanan parkir di luar badan jalan. Pajak ini berlaku bagi pihak yang mengelola tempat parkir, baik itu perorangan maupun badan usaha, dan dihitung dari jumlah pembayaran yang diterima dari pengguna jasa parkir

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pungutan daerah yang diberlakukan atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan

sarang burung walet oleh individu maupun badan usaha. Pajak ini muncul karena sarang burung walet memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan di beberapa daerah.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pungutan yang dikenakan pemerintah daerah atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang berada di wilayah desa maupun kota. Besarnya pajak dihitung berdasarkan nilai objek pajak, sehingga semakin tinggi nilai tanah atau bangunan, semakin besar pula kewajiban pajaknya. Pada dasarnya, PBB-P2 membantu daerah menjaga keteraturan tata ruang sekaligus memperkuat kemampuan keuangannya melalui sumber pendapatan yang stabil.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pungutan yang dikenakan ketika seseorang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, maupun cara perpindahan hak lainnya.

#### **2.1.1.2.2. Retribusi Daerah**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran

atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang secara langsung dan nyata diberikan kepada masyarakat atau pihak yang menggunakan layanan tersebut. Dalam konteks ini, objek retribusi daerah mencakup berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, tidak seluruh layanan daerah dapat dikenakan retribusi; hanya jasa-jasa yang dianggap layak menurut pertimbangan sosial dan ekonomi yang dapat dijadikan objek pungutan. Jenis layanan tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Menurut Marihot P. Siahaan dalam Edy & Rohayati (2018) Retribusi jasa umum merupakan pungutan yang dikenakan atas penyediaan layanan oleh pemerintah daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik serta memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara individual maupun kelembagaan. Layanan tersebut bersifat non-komersial dan diselenggarakan dalam rangka mendukung kepentingan umum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

#### 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan bentuk layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip-prinsip komersial, karena jenis layanan tersebut pada dasarnya juga dapat disediakan oleh pelaku usaha swasta. Kategori

jasa ini mencakup, antara lain, pemanfaatan atau penyewaan aset yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, penyediaan fasilitas penginapan, layanan bengkel kendaraan, fasilitas pencucian mobil, serta kegiatan penjualan bibit atau produk sejenis.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas layanan pemberian izin tertentu kepada individu atau badan izin yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan penggunaan ruang, sumber daya alam, fasilitas, atau aktivitas tertentu, dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **2.1.1.2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Pendapatan daerah yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), maupun pihak swasta.

#### **2.1.1.2.4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan daerah yang bersumber dari kegiatan sah secara hukum dan tidak termasuk kategori pajak daerah, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini umumnya berasal dari kegiatan non-perpajakan seperti penjualan aset, bunga simpanan, hasil kerja sama, denda kontraktual, dan pendapatan dari unit layanan daerah.

### 2.1.1.3. Teori Kapasitas Pajak (*Tax Capacity*)

teori kapasitas pajak (*tax capacity*) yang dikemukakan oleh Bahl dalam Andriany dan Qibthiyah (2018) menyebutkan bahwa potensi kemampuan suatu pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak apabila pemungutan dilakukan secara optimal, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial dan politik serta ketersediaan basis pajak yang ada pada saat tertentu. Bahl mengembangkan teori ini dari konsep *taxable capacity* Findlay Shirras.

Menurut Findlay Shirras, kapasitas perpajakan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk

Besarnya jumlah penduduk berpotensi memperluas basis pajak. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, peningkatan jumlah penduduk akan diikuti oleh bertambahnya jumlah subjek pajak, sehingga kapasitas perpajakan cenderung meningkat.

b. Distribusi pendapatan dan kekayaan

Pola distribusi pendapatan dan kekayaan berpengaruh terhadap kemampuan pemungutan pajak. Ketimpangan distribusi pendapatan mencerminkan potensi kapasitas pajak yang relatif lebih besar, sedangkan distribusi yang semakin merata dapat mempersempit ruang pemajakan.

c. Struktur dan keragaman sistem perpajakan

Sistem perpajakan yang beragam dan komprehensif memiliki kapasitas pemungutan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan sistem pajak tunggal, karena mampu menjangkau berbagai sumber dan objek pajak.

d. Tujuan dan orientasi kebijakan perpajakan

Apabila kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendukung pembiayaan program kesejahteraan sosial, maka kapasitas pemungutan pajak cenderung lebih tinggi karena adanya kebutuhan pembiayaan publik yang lebih besar.

e. Sikap dan kepatuhan masyarakat

Tingkat patriotisme dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan berperan penting dalam menentukan kapasitas pajak. Semakin tinggi kepatuhan dan rasa tanggung jawab warga negara, semakin besar kapasitas pajak yang dapat dihimpun.

f. Inflasi

Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan kapasitas perpajakan karena menggerus nilai riil pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan pajak.

g. Pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan pendapatan nasional, yang

pada akhirnya memperluas basis pajak dan meningkatkan kapasitas perpajakan suatu negara.

Dalam konteks empiris, kapasitas pajak suatu wilayah tercermin melalui indikator makro ekonomi yang membentuk basis pajak daerah. PDRB, jumlah industri, dan tingkat pengangguran terbuka merupakan komponen pembentuk basis pajak suatu wilayah. PDRB mencerminkan total aktivitas dan nilai tambah ekonomi yang menjadi sumber objek pajak atas konsumsi, usaha, dan kepemilikan. Jumlah industri mencerminkan aktivitas produksi dan usaha yang menghasilkan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, serta pemanfaatan aset, sehingga meningkatkan jumlah objek pajak. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka mencerminkan keterbatasan pendapatan dan daya beli masyarakat yang menurunkan konsumsi serta aktivitas ekonomi, sehingga melemahkan basis pajak. Dengan demikian, PDRB dan jumlah industri berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif karena menyempitkan basis pajak. Menurut Purwiyanto dan Tity Hernawati dalam Nurhabibah et al., (2021) Variasi penerimaan pajak (Basis Pajak) tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi suatu wilayah, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, aktivitas investasi, serta karakteristik angkatan kerja.

## **2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

### **2.1.2.1. Pengertian PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut (BPS) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB mencerminkan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu daerah. Ukuran ini menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi maupun Kabupaten dan Kota sesuai dengan batasan wilayah yang dianalisis. Penilaian terhadap kondisi ekonomi regional tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni atas dasar harga berlaku yang mencerminkan nilai nominal produksi, serta atas dasar harga konstan yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi perubahan harga.

Pada perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku, total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian harus konsisten dengan nilai akhir yang diperoleh dari proses produksi. Nilai tersebut mencerminkan besaran nilai tambah yang dihitung menggunakan harga pada periode berjalan. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh fluktuasi harga sehingga dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara riil dari waktu ke waktu.

### 2.1.2.2. Perhitungan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya dapat dihitung melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi menekankan pada perhitungan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor kegiatan ekonomi di suatu wilayah, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dalam pendekatan ini, PDRB diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi setelah dikurangi biaya antara. Sementara itu, pendekatan pengeluaran memandang PDRB sebagai total pengeluaran akhir yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu daerah. Komponen perhitungannya mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi, serta selisih antara ekspor dan impor. Adapun pendekatan pendapatan menghitung PDRB berdasarkan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yang meliputi upah dan gaji tenaga kerja, sewa atas penggunaan lahan, bunga sebagai imbalan modal, serta keuntungan atau laba yang diperoleh pelaku usaha. Meskipun ketiga pendekatan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda, secara teoritis hasil perhitungannya akan menghasilkan nilai PDRB yang sama karena menggambarkan aktivitas ekonomi yang identik dari sisi produksi, pengeluaran, dan distribusi pendapatan. PDRB terbagi menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Berikut rumus mencari PDRB atas dasar harga berlaku:

$$\mathbf{PDRB\ ADHB = \sum (Q \times P)}$$

Keterangan:

Q = jumlah output barang/jasa

P = harga berlaku (tahun berjalan)

Adapun rumus PDRB atas dasar harga konstan sebagai berikut:

$$\mathbf{PDRB\ ADHK = \sum (Q_{\text{tahun berjalan}} \times P_{\text{tahun dasar}})}$$

Keterangan:

Q = jumlah output barang/jasa

P = harga berlaku (tahun berjalan)

Dengan demikian, perbedaan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan terletak pada penggunaan dasar harga yang digunakan dalam proses perhitungannya. PDRB atas dasar harga berlaku mengukur nilai output barang dan jasa berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan sehingga masih dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga atau inflasi. Sebaliknya, PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga pada tahun dasar tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh fluktuasi harga. Oleh karena itu, PDRB atas dasar harga konstan lebih tepat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi riil dari waktu ke waktu, sedangkan PDRB atas

dasar harga berlaku lebih mencerminkan kemampuan ekonomi daerah secara nominal. Kedua jenis PDRB tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian suatu wilayah.

### **2.1.3. Jumlah Industri**

Industri dapat dipahami sebagai suatu sistem kegiatan ekonomi yang berfokus pada proses produksi, yaitu mengolah berbagai jenis input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, industri tidak hanya berfungsi sebagai sektor penyedia barang, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyerap tenaga kerja, serta pendorong transformasi struktural suatu negara.

Menurut Sukirno (2016) industri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang berorientasi pada proses transformasi bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Kegiatan ini mencakup rangkaian proses produksi yang terencana, penggunaan teknologi, serta pengelolaan sumber daya sehingga output yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi di masyarakat.

Dengan demikian, industri dapat disimpulkan sebagai himpunan berbagai aktivitas yang memiliki kesamaan karakteristik dalam menghasilkan barang maupun jasa melalui pemanfaatan tenaga kerja, teknologi, dan peralatan produksi. Proses tersebut bertujuan mengubah

bahan asal menjadi produk bernilai tambah sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan dapat digunakan secara lebih efektif oleh masyarakat.

### **2.1.3.1. Klasifikasi Industri**

#### **2.1.3.1.1. Klasifikasi Industri Berdasarkan Tenaga Kerja**

Sektor industri pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yakni industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Pembagian ini didasarkan pada karakteristik tertentu, seperti skala produksi, jumlah tenaga kerja, serta kapasitas modal yang digunakan. Adapun uraian masing-masing kategori dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Industri Kecil**

Industri kecil merupakan unit usaha yang menjalankan kegiatan produksinya dengan jumlah tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang, serta memiliki total nilai investasi maksimal Rp200.000.000,00 tidak termasuk bangunan dan lahan yang digunakan untuk beroperasi. Contoh industri kecil meliputi usaha kerajinan kayu, produksi makanan rumahan, serta kerajinan seni seperti lukis dan pahat. Secara umum, industri kecil memiliki karakteristik berupa penggunaan tenaga kerja yang umumnya berasal dari lingkungan sekitar atau memiliki hubungan kekerabatan, penerapan teknologi produksi yang relatif sederhana, serta jangkauan pemasaran yang masih terbatas pada wilayah lokal.

##### **b. Industri Sedang**

Industri sedang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang. Industri sedang umumnya ditandai oleh besaran modal yang relatif besar karena kapasitas produksinya yang lebih tinggi dibandingkan industri kecil. Tenaga kerja yang terlibat pada sektor ini biasanya memiliki keterampilan spesifik sesuai bidang operasionalnya, sehingga mampu mendukung efisiensi dan kualitas produksi. Selain itu, kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam industri sedang memegang peranan penting, karena pengelolaan yang efektif memungkinkan perusahaan memprediksi kondisi usaha di masa mendatang, mengelola risiko, serta merumuskan strategi pengembangan yang berkelanjutan. Contoh industri sedang antara lain usaha pengolahan makanan skala menengah, pabrik konveksi dengan kapasitas produksi besar, industri *furniture* dengan mesin modern, serta usaha percetakan komersial.

a. Industri Besar

Industri sedang umumnya ditandai oleh besaran modal yang relatif besar karena kapasitas produksinya yang lebih tinggi dibandingkan industri kecil. Tenaga kerja yang terlibat pada sektor ini biasanya memiliki keterampilan spesifik sesuai bidang operasionalnya, sehingga mampu mendukung efisiensi dan kualitas produksi. Selain itu, kepemimpinan dan kemampuan

manajerial dalam industri sedang memegang peranan penting, karena pengelolaan yang efektif memungkinkan perusahaan memprediksi kondisi usaha di masa mendatang, mengelola risiko, serta merumuskan strategi pengembangan yang berkelanjutan.

#### **2.1.3.2. Teori Industri**

Sektor industri merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan industri memiliki peran strategis dalam memperkuat basis ekonomi daerah melalui perluasan aktivitas produksi, peningkatan nilai tambah, serta ekspansi kegiatan usaha yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah. Dengan bertambahnya jumlah dan kapasitas industri, daerah memperoleh peluang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, dan berbagai pungutan legal lainnya, sehingga tercipta hubungan yang positif antara perkembangan sektor industri dan peningkatan PAD. Menurut teori Kaldor mengemukakan bahwa sektor industri manufaktur merupakan mesin pertumbuhan bagi sebuah wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor lain sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika sektor industri maju maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

#### **2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Menurut Sukirno dalam Sari (2019) mendefinisikan pengangguran sebagai keadaan ketika sebagian dari tenaga kerja tidak terserap dalam kegiatan ekonomi, sehingga tidak memperoleh pendapatan meskipun

mereka bersedia dan mampu bekerja. Menurutnya, pengangguran muncul akibat ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang ada. Tingkat pengangguran di suatu wilayah dapat diukur melalui persentase jumlah penduduk yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Perhitungan tersebut diperoleh dengan membagi jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan seratus untuk menyatakannya dalam bentuk persentase.

Pengangguran terbuka merupakan salah satu kategori pengangguran yang ditinjau berdasarkan karakteristiknya. Jenis pengangguran ini merujuk pada individu dalam angkatan kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari kesempatan kerja. Tingginya tingkat pengangguran terbuka mencerminkan kondisi ketika penduduk yang telah memasuki usia kerja belum berhasil memperoleh pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan proporsi angkatan kerja yang tergolong tidak bekerja, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Adapun rumus mencari tingkat pengangguran terbuka sebagai berikut:

$$\mathbf{TPT = \frac{JP}{JAK} \times 100\%}$$

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

JP : Jumlah Pengangguran (Orang)

JAK : Jumlah Angkatan Kerja (Orang)

#### 2.1.4.1. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Simanjuntak et al., (2025) jenis pengangguran dibedakan menjadi dua yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan penyebabnya

##### a. Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Sifatnya

1. Pengangguran terbuka menggambarkan kondisi ketika jumlah peluang kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah individu yang siap dan mampu bekerja. Situasi ini dapat muncul bukan hanya karena keterbatasan jumlah lowongan, tetapi juga akibat ketidaksesuaian antara kompetensi atau tingkat pendidikan pencari kerja dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, pengangguran terbuka mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penyerapan tenaga kerja secara optimal dalam perekonomian suatu daerah.
2. Pengangguran terselubung merujuk pada kondisi ketika jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi melebihi kebutuhan optimal yang diperlukan untuk mencapai tingkat produktivitas tertentu. Dalam situasi ini, sebagian pekerja sebenarnya tidak memberikan kontribusi berarti terhadap peningkatan output, sehingga kehadiran mereka tidak berdampak signifikan terhadap efisiensi produksi. Fenomena ini kerap ditemukan pada sektor informal atau kegiatan ekonomi berskala

kecil, di mana pembagian kerja tidak terstruktur secara proporsional. Dengan demikian, pengangguran terselubung mencerminkan pemanfaatan tenaga kerja yang kurang efisien, meskipun secara formal individu tersebut tercatat sebagai bekerja.

3. Pengangguran musiman merupakan bentuk pengangguran yang muncul akibat perubahan aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh siklus musim. Jenis pengangguran ini umumnya terjadi pada sektor-sektor yang memiliki pola kerja tidak kontinu sepanjang tahun, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pada sektor tersebut, tenaga kerja hanya terserap secara optimal pada periode tertentu, misalnya saat masa tanam, masa panen, atau musim melaut, sedangkan pada periode di luar musim tersebut tingkat kebutuhan tenaga kerja menurun signifikan. Dengan demikian, pengangguran musiman mencerminkan fluktuasi permintaan tenaga kerja yang bergantung pada kondisi alam dan siklus produksi, sehingga menimbulkan jeda kerja sementara bagi para pekerja.
4. Setengah menganggur, dimana mengacu pada keadaan ketika individu masih berada dalam aktivitas kerja, namun jumlah jam kerja yang dijalani jauh di bawah standar jam kerja normal yang berlaku. Kondisi ini muncul ketika tenaga kerja hanya memperoleh kesempatan kerja dalam durasi terbatas, sehingga kapasitas kerja mereka tidak terserap secara optimal oleh pasar tenaga kerja.

Fenomena tersebut sering kali menjadi indikator bahwa struktur kesempatan kerja di suatu wilayah belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja secara proporsional dengan potensi yang tersedia. Selain itu, setengah menganggur juga mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang layak, sehingga produktivitas tenaga kerja berada pada tingkat yang tidak maksimal.

b. Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

1. Pengangguran normal atau friksional merupakan bentuk pengangguran yang muncul sebagai konsekuensi dari proses pencarian kerja yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh posisi yang paling sesuai dengan kompetensi, pengalaman, serta preferensi mereka. Situasi ini terjadi ketika tenaga kerja secara aktif berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau saat mereka menunda menerima suatu pekerjaan karena menilai terdapat peluang lain yang menawarkan prospek karier, lingkungan kerja, atau tingkat upah yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, perusahaan juga menjalankan proses seleksi yang ketat guna memastikan bahwa kandidat yang dipilih benar-benar sesuai dengan standar kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Mekanisme pencarian dan penyaringan ini menyebabkan jeda waktu tertentu sebelum pelamar dan pemberi kerja menemukan kecocokan,

sehingga memicu munculnya pengangguran friksional sebagai bagian alami dari dinamika pasar tenaga kerja.

2. Pengangguran siklikal merupakan jenis pengangguran yang muncul akibat melemahnya aktivitas ekonomi secara menyeluruh, terutama ketika permintaan pasar atau permintaan agregat mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini biasanya tampak pada masa resesi, ketika perekonomian mengalami perlambatan yang cukup serius, sehingga banyak pelaku usaha mengurangi produksi, menekan biaya operasional, dan pada akhirnya melakukan pengurangan tenaga kerja. Dalam situasi yang lebih parah, yaitu saat perekonomian memasuki masa depresi, penurunan aktivitas ekonomi terjadi secara mendalam dan berkepanjangan sehingga peluang kerja semakin menyusut. Oleh karena itu, pengangguran siklikal pada dasarnya berkaitan erat dengan perubahan siklus bisnis, di mana penurunan permintaan barang dan jasa secara langsung mempengaruhi kapasitas perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerjanya.
3. Pengangguran struktural merupakan bentuk pengangguran yang muncul akibat terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian. Perubahan tersebut dapat berupa perkembangan teknologi yang menggantikan peran tenaga kerja manusia, pergeseran pola permintaan pasar, atau transformasi ekonomi dari sektor agraris menuju sektor industri dan jasa. Dalam kondisi ini, sebagian tenaga

kerja kehilangan pekerjaan karena keterampilan yang mereka miliki tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang baru. Ketidaksesuaian antara kompetensi pekerja dan kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan menyebabkan sebagian individu tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Akibatnya, meskipun peluang kerja tersedia, tidak semua pencari kerja dapat mengisi posisi tersebut karena perbedaan keterampilan yang cukup signifikan.

#### **2.1.4.2. Teori Pengangguran**

##### **1. Teori Keynes**

Menurut pandangan John Maynard Keynes, pengangguran merupakan hasil dari rendahnya permintaan agregat dibandingkan kapasitas produksi yang tersedia di suatu perekonomian. Ketika banyak tenaga kerja tidak terserap, aktivitas produksi menurun, yang kemudian mengurangi tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat. Dalam kerangka Keynesian, konsumsi memiliki peran dominan sebagai pendorong utama permintaan agregat; oleh karena itu, meningkatnya pengangguran akan menekan daya beli masyarakat dan menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini menciptakan lingkaran melemah yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan pemerintah untuk mendorong permintaan.

Pandangan Keynes bertentangan dengan teori ekonomi klasik yang berasumsi bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja akan menekan

tingkat upah hingga mencapai keseimbangan pasar. Menurut kerangka klasik, penurunan upah seharusnya mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Namun, Keynes berargumen bahwa mekanisme tersebut tidak selalu berlaku dalam praktik. Penurunan upah justru dapat melemahkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Dalam kondisi tersebut, produsen mengalami penurunan pendapatan dan tidak memiliki insentif untuk menambah tenaga kerja.

#### 2.1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan untuk melihat perbandingan serta mengidentifikasi ruang inovasi dalam penelitian yang akan dilakukan. Keberadaan penelitian sebelumnya juga membantu peneliti dalam menentukan posisi penelitian dan menegaskan unsur kebaruan yang ingin dicapai.

Pada bagian ini, peneliti menyajikan rangkuman penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan sejauh mana penelitian ini menawarkan orisinalitas. Adapun sejumlah penelitian yang relevan dengan kajian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No. | Peneliti, dan Judul Penelitian          | Persamaan                    | Perbedaan             | Hasil Penelitian                                    | Sumber                     |
|-----|---|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| (1) | (2)                                     | (3)                          | (4)                   | (5)   | (6)                        |
| 1   | Hermawan et al., (2022)<br>Peran Sektor | Variabel Dependen: PDRB, dan | Variabel Tenaga Kerja | tenaga kerja tidak memiliki pengaruh sedangkan PDRB | Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, |

| No. | Peneiliti, dan Judul Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan   | Hasil Penelitian   | Sumber  |
|-----|--|--|---|--|---|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   |
|     | Industri Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi   | Jumlah Industri<br><br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah                               |   | dan Jumlah Industri berpengaruh positif  | Vol 2(3) 2022, Hal. 162-170   |
| 2   | Tutu (2022) Analisis pola Pertumbuhan Ekonomi serta Pengaruh Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar                         | Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)<br><br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah | Metode menggunakan Trandline dan variabel jumlah penduduk | PDRB memiliki pengaruh positif sedangkan jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif   | Jurnal LINEARS, September, 2022 Vol. 5, No. 2, Hal. 87-96   |
| 3   | Rizky Ramadhani et al., (2024) Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat | Variabel Dependen: PDRB<br><br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah                       | Variabel Belanja Daerah                                   | PDRB dan belanja daerah secara parsial dan bersama-sama memiliki pengaruh  | Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Vol. 1, No. 3 Juli 2023 e-ISSN: 2962-083X; p-ISSN: 2964-531X, Hal 250-267 |
| 4   | Anam & Kusuma (2021) Determinan Kapasitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019               | Variabel Dependen: PDRB<br><br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah                       | Pajak Daerah dan jumlah penduduk                          | Pajak daerah , Jumlah penduduk, dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan  | Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)Vol. 5, No. 4, November 2021, pp. 618 -631   |
| 5   | Rahman & Restiatun, (2023) Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, dan  | Variabel Dependen: Tingkat Pengangguran Terbuka<br><br>Variabel Independen: Pendapatan           | Jumlah Kendaraan Bermotor dan jumlah penduduk             | Jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh sedangkan Tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh | Sebatik Vol. 27 No. 2 Desember 2023 ISSN: 1410-3737(p)26 21-069X(e)   |

| No. | Peneiliti, dan Judul Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan  | Hasil Penelitian  | Sumber   |
|-----|--|---|--|---|--|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)   | (6)  |
|     | Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Barat   | Asli Daerah   |  |   |  |
| 6   | Lestari & Hariani, (2020) Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah                                    | Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi<br><br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah | Variabel Belanja Modal dan jumlah penduduk         | Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif sedangkan belanja modal memiliki pengaruh negatif | Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 3, No.2, Juli_Desember2020, pp.77 - 84eISSN 2655-237X |
| 7   | Boimata et al., (2023) Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang                          | Variabel Dependen: Jumlah Industri<br><br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah     | Variabel Pajak Reklame                             | Pajak reklame dan jumlah industri memiliki pengaruh positif   | JURNAL MANEKSI VOL 12, NO. 1, MARET 2023 p-ISSN: 2302-9560/e-ISSN: 2597-4599                             |
| 8   | Asmynendar et al., (2021) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Hunian Hotel, dan Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu | Variabel Dependen: PDRB<br><br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah                | Variabel Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Wisatawan | PDRB, tingkat hunian hotel dan jumlah wisatawan memiliki pengaruh positif   |  |
| 9   | Nashiruddin & Witono (2024) Pengaruh PDRB, Investasi, Dan  | Variabel Dependen: PDRB<br><br>Variabel   | Variabel Investasi dan jumlah penduduk             | PDRB memiliki pengaruh positif sedangkan Investasi dan Jumlah Penduduk tidak tidak memiliki                         | COSTING :Journal of Economic, Business and   |

| No. | Pencili, dan Judul Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan  | Hasil Penelitian  | Sumber  |
|-----|--|--|--|---|---|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)   | (6)   |
|     | Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah  | Independen: Pendapatan Asli Daerah   |  | pengaruh  | Accounting Volume 7 Nomor 2, Tahun 2024e- ISSN : 2597-5234  |
| 10  | Fariantin et al., (2017) Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata dan PDRB (non migas-non pertanian) Terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Lombok Utara                 | Variabel Dependen: PDRB<br><br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah                         | Variabel Sektor Pariwisata   | jumlah objek wisata, jumlah wisatawan dan Produk Domestik Regional Bruto (non migas dan non pertanian) secara simultan memiliki pengaruh  | Jurnal Ilmiah, 14(1), 46–52.<br><a href="https://doi.org/10.35748/valid.v14i1.31">https://doi.org/10.35748/valid.v14i1.31</a> |
| 11  | Haerana (2021) Penentuan Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene  | Variabel Dependen: PDRB<br><br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah                         | Variabel Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Jumlah penduduk dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap sedangkan PDRB, Retribusi daerah, Pajak daerah dan lain lain pendapatan asli Daerah yang sah memiliki pengaruh   | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 6, No. 1, 2021   |
| 12  | Azizah & Asmara, (2023) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik | Variabel Dependen: Tingkat Pengangguran Terbuka<br><br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah | Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Belanja Daerah   | Pajak Daerah berpengaruh signifikan sedangkan retribusi daerah, belanja daerah, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah dan tingkat pengangguran terbuka memiliki | JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891 Volume 9 (5) Oktober Tahun 2023, Hal    |

| No. | Peneiliti, dan Judul Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan  | Hasil Penelitian  | Sumber  |
|-----|--|--|--|---|---|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)   | (6)   |
| 13  | Okzella et al., (2025) Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi   | Variabel Dependen: Pengangguran<br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah                 | Variabel Kemiskinan dan Metode menggunakan regresi linear Berganda | pengaruh Kemiskinan berpengaruh tidak signifikan sedangkan pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah  | 1943-1954<br><i>Jurnal Development</i> , 13(2), 280–294.<br><a href="https://doi.org/10.53978/jd.v13i2.655">https://doi.org/10.53978/jd.v13i2.655</a> |
| 14  | Muliyawan dan Hasmarini, (2023) Analisis Determinan Tingkat Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah   | Variabel Dependen: Tingkat Pengangguran Terbuka<br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah | Variabel IPM, Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan                    | Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap PAD di Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap PAD, sedangkan kemiskinan dan tingkat pendidikan berpengaruh positif | JIS: Jurnal Ilmu SosialISS N: 2548-4893<br><a href="https://doi.org/10.21831/jis.v3i1.83">https://doi.org/10.21831/jis.v3i1.83</a>                    |
| 15  | Juwita & Widia, (2022) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat | Variabel Dependen: PDRB<br>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah                         | Objek Provinsi Sumatera Barat                                      | PDRB tidak berpengaruh signifikan   | Land Journal p-ISSN: 2715-9590Volume 3, Nomor 1, Januari2022e-ISSN: 2716-263X   |

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten yang menunjukkan pola fluktuatif dan belum kembali mencapai capaian optimal seperti pada periode 2015–2016, meskipun Banten memiliki struktur ekonomi yang kuat berbasis industri dan tingkat kemandirian

fiskal yang relatif tinggi. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi daerah yang belum dikelola secara maksimal. Di sisi lain, PDRB yang cenderung meningkat, dinamika jumlah industri besar dan sedang, serta fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan adanya perubahan struktural ekonomi dan ketenagakerjaan yang diduga berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD.

Hubungan antara PDRB dan PAD dapat dipahami melalui mekanisme fiskal yang bersifat fungsional. Ketika PDRB meningkat, aktivitas ekonomi daerah juga bertambah, sehingga nilai transaksi, produksi, dan perputaran sektor usaha menjadi lebih besar. Kondisi ini secara langsung memperluas basis pemungutan pajak dan retribusi daerah, baik dari sisi objek maupun nilai yang dikenakan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa Pendapatan suatu wilayah berasal dari produksi barang dan jasa.

Dengan meluasnya basis penerimaan tersebut, pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal yang lebih besar melalui peningkatan PAD, terutama dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hubungan ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRB berpotensi memperkuat kapasitas fiskal daerah secara langsung. Menurut Rizky Ramadhani et al., (2024) Peningkatan PDRB merupakan indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Kenaikan nilai PDRB menunjukkan adanya ekspansi aktivitas ekonomi yang pada akhirnya memperluas potensi sumber penerimaan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin tinggi

PDRB suatu wilayah, semakin besar pula peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Syahroni & Ardhiarisca (2023), Hermawan et al., (2022), Anam & Kusuma (2021) dan Haerana (2021) menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh ini muncul karena berbagai lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB memberikan kontribusi besar terhadap sumber-sumber PAD, khususnya sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, serta sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk perdagangan mobil dan sepeda motor. Dengan demikian, semakin kuat pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan PDRB, semakin besar pula potensi peningkatan PAD suatu daerah.

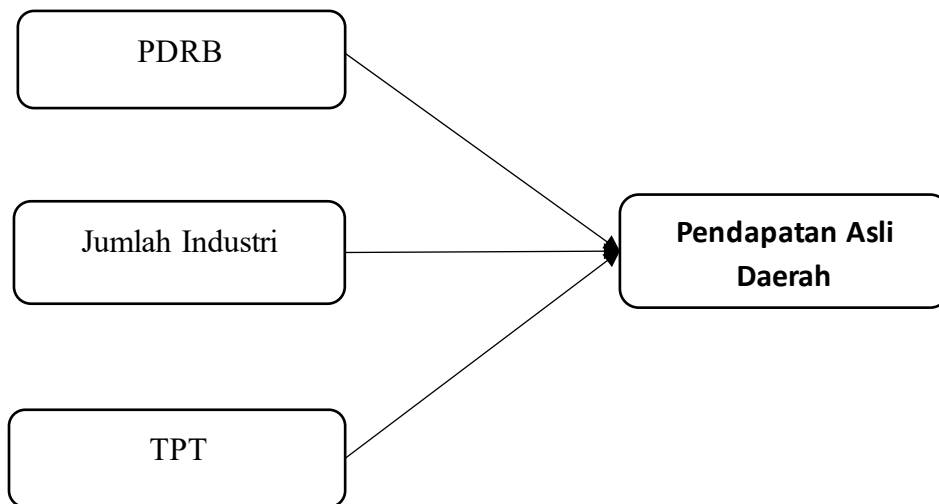
Berbagai jenis industri, mulai dari skala kecil hingga berskala besar, tumbuh di berbagai daerah. Kehadiran sektor industri tersebut umumnya memberikan kontribusi positif, baik terhadap perekonomian daerah maupun terhadap pendapatan pemerintah daerah melalui berbagai bentuk penerimaan resmi. Namun demikian, perkembangan industri juga dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Safitri dalam Hermawan et al., (2022) menyebutkan bahwa peningkatan aktivitas dan kapasitas sektor industri di suatu daerah berkontribusi positif terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah, dan sebaliknya, ketika sektor industri melemah maka potensi penerimaan daerah juga menurun.

Menurut Sutrisno dalam penelitian Boimata et al., (2023) Jumlah industri memiliki keterkaitan yang signifikan dengan penerimaan Pajak Reklame. Banyaknya unit usaha biasanya diikuti oleh meningkatnya kebutuhan pemasangan media promosi, termasuk papan reklame yang menjadi objek pajak daerah. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah industri secara tidak langsung mendorong bertambahnya potensi penerimaan pajak dari sektor reklame. Dalam konteks pendapatan daerah, peningkatan jumlah industri di suatu wilayah pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena semakin luasnya basis pajak yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan et al., (2022) dan Boimata et al., (2023) juga menyatakan bahwa jumlah industri memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat pengangguran yang tinggi berpotensi menekan penerimaan Pendapatan Asli Daerah karena berkurangnya aktivitas ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya mengurangi kontribusi masyarakat terhadap berbagai sumber penerimaan daerah (Azizah & Asmara 2023). Hal serupa dikemukakan oleh Rahman & Restiatun (2023) ketika jumlah penganggur terbuka meningkat, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban fiskal seperti pajak dan retribusi menjadi semakin terbatas. Berkurangnya kapasitas ekonomi rumah tangga tersebut pada akhirnya menurunkan potensi penerimaan pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan tersebut. Kondisi ini secara keseluruhan berkontribusi pada melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingkat pengangguran yang tinggi pada suatu daerah umumnya berimplikasi langsung terhadap rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. Ketika sebagian penduduk tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, daya beli masyarakat menurun dan perputaran ekonomi lokal melemah. Akibatnya, potensi penerimaan daerah dari berbagai komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi jasa usaha, maupun pendapatan dari pemanfaatan aset daerah menjadi terbatas.

Berdasarkan uraian teoritis dan empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, keterkaitan antara variabel PDRB, jumlah industri, serta tingkat pengangguran terbuka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diigambarkan secara sistematis sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

### **2.3. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dirumuskan sebagai respon terhadap pertanyaan penelitian. Pernyataan ini disusun dengan mengacu pada

landasan teori yang relevan serta temuan empiris yang tersedia. Karena masih bersifat perkiraan awal, hipotesis memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui proses pengumpulan dan analisis data.

Berdasarkan penjelasan teoritis dan temuan empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDRB dan jumlah industri berpengaruh positif sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten periode 2010-2023.
2. Diduga secara simultan PDRB, jumlah industri, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten periode 2010-2023.